

The Middle Class Under Pressure: Its Impact on Household Consumption and the Indonesian Economy

Ra'iyatu Imadidin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Diterima: 13 11 2026 | Revisi: 03 02 2026 | Disetujui: 20 05 2026 | Diterbitkan: 21 05 2026

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between Gross Domestic Product (GDP), household consumption, and the middle class in Indonesia using five-year time series data and Pearson correlation analysis. The results indicate a strong negative correlation between household consumption and the middle class, as well as between GDP and the middle class. This implies that rising GDP and consumption are not accompanied by middle-class expansion. Increased consumption is mainly driven by inflation and higher living costs rather than real income growth. Indonesia's economic growth remains non-inclusive, with benefits concentrated among higher-income groups. Therefore, policies focusing on equitable income distribution, stronger purchasing power, and productivity improvements are essential to reinforce the resilience of the middle class.

Keywords: middle class; GDP; household consumption; correlation

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga, dan kelas menengah di Indonesia dengan menggunakan data runtun waktu selama lima tahun serta analisis korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat antara konsumsi rumah tangga dan kelas menengah, serta antara PDB dan kelas menengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDB dan konsumsi tidak diikuti oleh perluasan proporsi kelas menengah. Kenaikan konsumsi terutama dipengaruhi oleh inflasi dan meningkatnya biaya hidup, bukan oleh pertumbuhan pendapatan riil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih belum inklusif karena manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan perlu difokuskan pada pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli, dan produktivitas untuk memperkuat ketahanan ekonomi kelas menengah.

Kata kunci: kelas menengah, PDB, konsumsi rumah tangga, korelasi

How to cite:

Ra'iyatu Imadidin (2025) The Middle Class Under Pressure: Its Impact on Household Consumption and the Indonesian Economy. *Journal of Economics Development Issues*, Vol 9(no.1), pp 34-47
<https://doi.org/10.33005/jedi.v9i1.442>

PENDAHULUAN

Peran kelas menengah dalam perekonomian sangat krusial karena kelompok ini menjadi fondasi utama aktivitas konsumsi rumah tangga dan permintaan agregat. Sejumlah kajian menyatakan bahwa keberadaan kelas menengah yang kuat dapat menggerakkan roda ekonomi melalui peningkatan konsumsi, investasi pendidikan, serta kebutuhan terhadap berbagai layanan perkotaan (Banerjee & Duflo, 2008; Kharas, 2017). Di sisi lain, meskipun tren global menunjukkan pertumbuhan signifikan kelas menengah, penelitian juga menyoroti bahwa kelompok ini masih menghadapi berbagai risiko, seperti kenaikan biaya hidup, pendapatan yang tidak bergerak, serta guncangan ekonomi eksternal yang dapat menghambat mobilitas sosial dan bahkan menurunkan status ekonomi sebagian masyarakat (Ravallion, 2010). Kondisi tersebut juga tampak di Indonesia, di mana melemahnya daya beli, menurunnya konsumsi rumah tangga, dan meningkatnya jumlah kelompok rentan memperlihatkan indikasi penyusutan kelas menengah, terutama setelah pandemi dan lonjakan inflasi dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2025). Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk memahami perubahan struktur kelas menengah secara lebih mendalam.

Fenomena terkait kualitas pertumbuhan juga menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak otomatis memperkuat posisi kelas menengah bila tidak diikuti pemerataan akses ekonomi dan stabilitas sosial yang memadai (Mlachila et al., 2014). Dalam konteks nasional, data BPS menunjukkan bahwa kelas menengah dan kelompok yang mendekati kategori tersebut mencakup lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia serta menyumbang lebih dari 80 persen total konsumsi, sehingga perubahan dalam ukuran kelompok ini akan sangat memengaruhi pola permintaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah (BPS, 2025). Meski demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian, khususnya terkait kurangnya studi yang secara bersamaan menilai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan proporsi kelas menengah pada periode pascapandemi, termasuk bagaimana dinamika konsumsi serta kerentanan ekonomi kelompok ini berkembang (Kharas, 2017; Ravallion, 2010).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran kelas menengah, konsumsi rumah tangga, maupun kualitas pertumbuhan ekonomi secara terpisah, masih terbatas kajian yang secara komprehensif dan simultan menganalisis perkembangan jumlah dan proporsi kelas menengah serta keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) dan konsumsi rumah tangga, khususnya dalam konteks Indonesia pada periode pascapandemi. Sebagian besar studi cenderung menitikberatkan pada aspek makro pertumbuhan ekonomi atau pola konsumsi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dinamika struktur kelas menengah dan tingkat kerentanannya terhadap guncangan ekonomi. Kesenjangan penelitian ini menjadi dasar penting untuk melakukan kajian yang lebih kontekstual dan empiris. Oleh karena itu, memperkuat pendapatan dan kemampuan belanja masyarakat menjadi langkah penting untuk memulihkan ketahanan kelas menengah agar konsumsi kembali dapat menjadi penggerak utama perekonomian. Dengan memahami perubahan struktur kelas menengah dan pola konsumsinya, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perkembangan jumlah dan proporsi kelas menengah di Indonesia serta mengkaji keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) dan konsumsi rumah tangga sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memanfaatkan data pascapandemi untuk menangkap dinamika terkini kelas menengah yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai perubahan struktur kelas menengah serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi empiris bagi perumusan strategi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan

KAJIAN LITERATUR

Konsumsi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan serta memberikan kepuasan bagi individu (Ariani, 2004). Pemikiran awal mengenai perilaku konsumsi modern banyak dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan John Maynard Keynes dalam karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936. Dalam penjelasan Mankiw (2016), teori tersebut dikenal sebagai Hipotesis Pendapatan Absolut, yang menekankan bahwa tingkat konsumsi sangat bergantung pada pendapatan yang diterima pada periode tertentu. Dengan demikian, perubahan pendapatan akan berdampak langsung pada jumlah konsumsi yang dilakukan individu atau rumah tangga. Teori konsumsi Keynesian menempatkan pendapatan sebagai determinan utama dalam perilaku konsumsi selain faktor tambahan seperti harga dan preferensi, teori ini juga menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi dalam menjaga stabilitas konsumsi dan aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan absolut sendiri merujuk pada pendapatan aktual suatu negara atau individu pada periode berjalan, yang sering dikaitkan dengan indikator Produk Domestik Bruto (Silvia & Susanti, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah dan kualitas barang yang dikonsumsi semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas barang yang dibeli (Nababan, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan memainkan peran penting dalam membentuk pola pengeluaran konsumsi masyarakat, di mana peningkatan pendapatan umumnya diikuti oleh peningkatan konsumsi (Hasmarini, 2005)

Middle-Class Engine Theory berargumen bahwa kelas menengah memiliki peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui tiga pilar utama, yaitu belanja, pendidikan, dan investasi. Keberadaan kelompok atau kelas menengah dalam suatu negara atau perekonomian bukanlah isu yang baru. Para sejarawan ekonomi seperti Adelman dan Morris (1967) serta Landes (1998) berpendapat bahwa kelas menengah berperan sebagai penggerak utama dalam percepatan pembangunan ekonomi di Inggris dan Eropa pada abad ke-19, sebagaimana dikutip dalam Easterly (2001). Oleh karena itu, perhatian terhadap kelas menengah serta kebijakan yang mendukungnya semakin meningkat. Hal ini juga didasari oleh keyakinan bahwa kelas menengah merupakan syarat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mendukung dan memperkuat kelas menengah, negara dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelas menengah yang kuat dapat berfungsi sebagai penggerak positif dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Analisis mengenai kelas menengah sebagai topik utama juga memberikan dampak signifikan terhadap kelompok ini dalam konteks masyarakat, politik, dan ekonomi. Kelas menengah dipandang sebagai pilar utama ekonomi pasar dan demokrasi, yang berperan dalam memastikan stabilitas sosial dan politik dengan mendorong kesatuan sosial serta mengurangi ketegangan antara kelompok kaya dan miskin (Birdsall et al., 2000). Kelas menengah yang stabil dipercaya memberikan manfaat ekonomi serta mendukung pertumbuhan jangka panjang melalui investasi pada sumber daya manusia, konsumsi, dan tabungan, yang pada akhirnya mendorong permintaan konsumen, kemajuan kewirausahaan, dan investasi jangka panjang (Murphy et al., 1989; Doepke & Zilibotti, 2007). Dengan mempertimbangkan pentingnya peran kelas menengah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga stabilitas kelas menengah dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, sehingga dapat menjadi

dasar bagi perumusan kebijakan fiskal, subsidi, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan tren jumlah dan proporsi kelas menengah serta pola konsumsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahap ini, data diolah untuk menampilkan perkembangan variabel secara kronologis sehingga peneliti dapat memahami perubahan dan kecenderungan umum sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Metode yang kedua pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDB), konsumsi rumah tangga, dan proporsi kelas menengah di Indonesia. Pemilihan metode korelasi didasarkan pada keterbatasan jumlah data tahunan yang tersedia, sehingga pendekatan ini lebih sesuai untuk menggambarkan derajat keeratan hubungan antarvariabel tanpa harus mengasumsikan adanya hubungan kausal langsung.

Alur metode dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dan penyaringan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dalam format time series agar siap dianalisis. Setelah itu, analisis deskriptif dilakukan untuk melihat pola awal dan perubahan dari setiap variabel. Tahap berikutnya adalah perhitungan korelasi Pearson untuk menguji hubungan antarvariabel, diikuti dengan interpretasi nilai koefisien korelasi guna mengetahui kekuatan serta arah hubungannya. Dengan alur tersebut, analisis dapat dilakukan secara sistematis mulai dari penjelajahan data hingga penarikan kesimpulan empiris. Dalam konteks ekonomi pembangunan, peningkatan pendapatan nasional melalui pertumbuhan PDB umumnya diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat, yang tercermin dalam naiknya konsumsi rumah tangga dan bertambahnya ukuran kelas menengah. Oleh karena itu, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui apakah perubahan dalam PDB dan konsumsi rumah tangga memiliki hubungan dan signifikan terhadap perkembangan kelas menengah. Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antarvariabel, sehingga memberikan gambaran empiris tentang bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi dan konsumsi dapat berhubungan dengan ekspansi kelas menengah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, artinya dikumpulkan dari temuan penelitian sebelumnya serta dari beberapa sumber data yang relevan seperti Badan Pusat Statistik.

Langkah-langkah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengumpulan data yaitu mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi resmi lainnya yang relevan dengan variabel penelitian, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga, dan jumlah serta proporsi kelas menengah. Kedua, penyaringan dan penyusunan data yaitu menyeleksi data sesuai periode pengamatan dan menyusunnya dalam format time series agar siap untuk dianalisis. Ketiga, melakukan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola awal, tren, dan perubahan masing-masing variabel penelitian. Keempat, melakukan analisis korelasi yaitu menggunakan korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDB), konsumsi rumah tangga, dan perkembangan kelas menengah. Kelima, interpretasi hasil analisis yaitu menafsirkan nilai koefisien korelasi untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antarvariabel. Terakhir, melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis empiris untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan implikasi kebijakan.

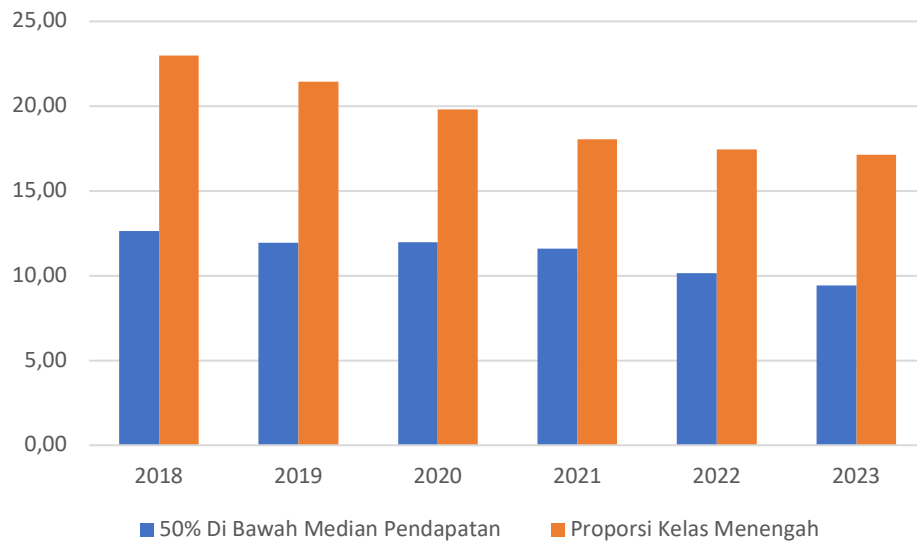
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu negara atau perekonomian, peran dan eksistensi kelas menengah (*middle class*) sebenarnya bukan lagi isu baru. Kelas menengah telah menjadi isu sentral karena memberikan pengaruh yang kuat terhadap kelompok masyarakat, politik dan ekonomi. Kelas menengah dianggap sebagai tulang punggung ekonomi dan demokrasi yang menjamin stabilitas sosial dan politik dengan mendorong kohesi sosial dan memitigasi konflik antara yang kaya dan miskin. Beberapa kajian mengenai peran kelas menengah telah menempatkan kelompok ini sebagai aktor sentral dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kelas menengah tidak hanya berperan sebagai penggerak utama dalam sistem ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga kestabilan demokrasi. Kelompok tersebut berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial dan politik dengan memperkuat kohesi sosial serta mengurangi ketegangan antara kelompok kaya dan miskin (Birdsall et al., 2000). Keberadaan kelas menengah yang besar, mapan, dan terus berkembang dianggap mampu menciptakan berbagai keuntungan ekonomi jangka panjang. Secara khusus, kelas menengah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi pada sumber daya manusia, konsumsi domestik yang kuat, dan kebiasaan menabung yang tinggi. Semua ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi juga memperluas basis kelas menengah itu sendiri (Easterly, 2001). Lebih jauh, permintaan konsumen yang berasal dari kelas menengah menjadi pendorong utama dalam dinamika pasar sekaligus menciptakan ruang bagi munculnya pelaku usaha baru, memperkuat budaya kewirausahaan, dan mendukung investasi jangka panjang (Doepke & Zilibotti, 2007; Acemoglu & Zilibotti, 1997). Menurut Banerjee & Duflo (2008) kelas menengah yang besar dapat berkontribusi pada pembangunan karena beberapa alasan yaitu pertama, kelas menengah memiliki keterkaitan yang erat dengan keberlanjutan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka hubungan kausal antara demokrasi dan pertumbuhan, kelas menengah dapat dilihat sebagai katalis utama yang mendorong kemajuan ekonomi melalui penguatan institusi demokratis. Artinya, jika demokrasi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, maka kelas menengah sebagai penopangnya juga berkontribusi secara signifikan terhadap proses tersebut. Kedua, kelas menengah sering kali menjadi sumber utama wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Keberadaan mereka menumbuhkan dinamika ekonomi lokal dan memperkuat struktur pasar tenaga kerja. Tidak kalah penting, nilai-nilai yang dijunjung oleh kelas menengah seperti pentingnya pendidikan, kerja keras, akumulasi tabungan, dan aspirasi sosial merupakan bentuk modal manusia dan finansial yang sulit diperoleh oleh kelompok miskin, namun sangat vital dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Ketiga kelas menengah juga memengaruhi arah dan struktur permintaan pasar. Mereka memiliki preferensi terhadap produk-produk berkualitas tinggi dan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan barang dengan nilai tambah tersebut. Permintaan ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, berinovasi, dan berinvestasi dalam teknologi serta strategi pemasaran, yang semuanya berkontribusi terhadap skala produksi yang lebih besar (*increasing returns to scale*). Proses ini pada akhirnya menciptakan siklus pertumbuhan yang inklusif, di mana peningkatan pendapatan tidak hanya terbatas pada kelas menengah itu sendiri, tetapi juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, ketika akses terhadap pendidikan dan pelatihan meningkat, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga memiliki peluang untuk mengakumulasi modal sumber daya manusia. Hal ini membuka jalan bagi mobilitas sosial dan memungkinkan mereka untuk bergabung ke dalam kelas menengah, menciptakan efek domino yang memperluas basis kelas menengah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Definisi kelas menengah bukanlah hal yang sederhana karena kelompok ini tidak memiliki batasan yang jelas atau karakteristik khusus yang benar-benar membedakannya dari strata sosial lainnya. Kelas menengah justru mencakup beragam lapisan masyarakat, baik dari segi tingkat ekonomi yaitu menempati posisi antara kelompok miskin dan kelompok kaya, maupun dari status sosial yaitu berada di antara dua kelas di atasnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ahli untuk merumuskan definisi kelas menengah. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan yaitu pendekatan relatif dan absolut. Pendekatan relatif mendefinisikan kelas menengah berdasarkan posisi mereka dalam struktur sosial-ekonomi, baik dari segi pendapatan maupun pola konsumsi. Kelompok ini ditempatkan sebagai lapisan tengah antara kelas bawah dan kelas atas. Kemudian pendekatan absolut menetapkan batasan kelas menengah berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran konsumsi tertentu yang diukur secara numerik.

Menurut ADB (2010), terdapat beberapa faktor kunci mendorong perluasan kelas menengah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi elemen-elemen utama tersebut meliputi pertama, Ekspansi Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan yaitu Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan berperan penting dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menuju status kelas menengah. Birdsall (2007) menekankan bahwa pertumbuhan inklusif yang ditandai dengan meluasnya peran ekonomi kelas menengah memerlukan dukungan kebijakan seperti Pengelolaan fiskal yang ketat melalui pengaturan utang, Sistem perpajakan dan redistribusi yang berkeadilan, Stabilitas perdagangan, Kebijakan moneter yang menjaga inflasi tetap rendah dan Pembangunan infrastruktur. Kedua, Peluang Kerja dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di dalamnya terdapat dua pilar utama pembentuk kelas menengah adalah Ketersediaan pekerjaan dengan upah kompetitif dan jaminan sosial dan Akses terhadap pendidikan berkualitas yang lebih luas. Ketiga, Dinamika Mobilitas Sosial dan Kerentanan Ekonomi meskipun menunjukkan pertumbuhan signifikan, sebagian kelompok kelas menengah khususnya tetap rentan mengalami kemunduran ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas kelas menengah masih perlu diperkuat untuk mencegah penurunan kembali ke garis kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu penyusutan kelas menengah yang drastis. Menurut data Badan Pusat Statistik (2025) jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk pada 2019. Lalu, pada 2024 hanya tersisa menjadi 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya, sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah turun kelas. Penyusutan ini tidak hanya berdampak pada jumlah individu, tetapi juga pada pola konsumsi dan daya beli masyarakat. Sementara itu, lebih spesifik lagi pada Provinsi Jawa proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% median pendapatan menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu 2018-2023. Pada Provinsi Jawa Timur menurun dari 16% jadi 11%, pada Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan penurunan dari 11,25% menjadi 9,9% dan pada Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dengan proporsi tahun 2018 sebesar 19,25% menjadi 15,29% pada tahun 2023. Menurut Badan Pusat Statistik, 50% dari median pendapatan adalah sebesar Rp.2.500.000,- sedangkan pendapatan kelas menengah adalah berkisar antara Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.9.900.000,- per kapita per bulan. Data ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kelas menengah tidak hanya di Indonesia secara umum tetapi juga pada tingkat Provinsi terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Indonesia proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% median pendapatan juga menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu 2018-2023.



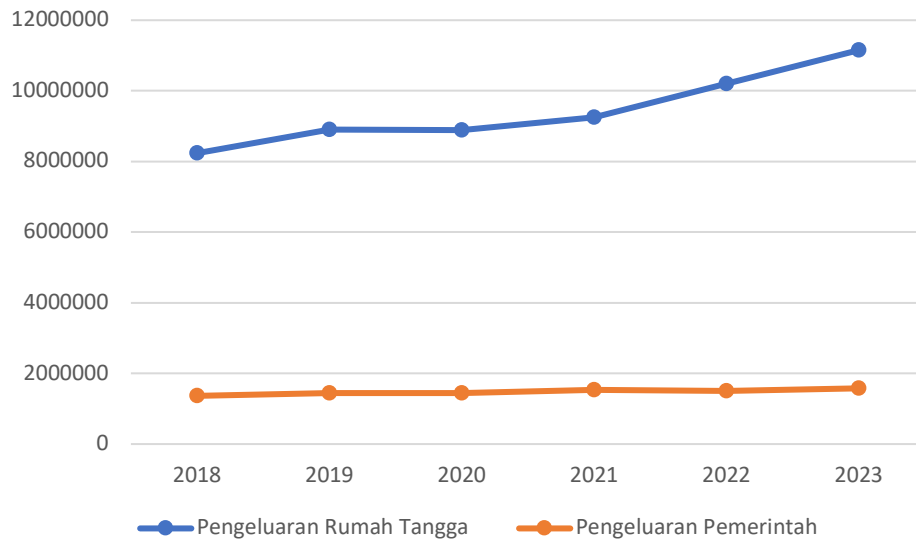
Gambar 1. Perbandingan Proporsi Pendapatan Kelas Menengah dan 50% Di Bawah Median Pendapatan.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Gambar di atas menunjukkan tren menurun dari 12,63% pada tahun 2018 dan pada tahun 2023 menjadi 9,44%. Menurut World Bank, Penduduk yang hidup di bawah 50% median pendapatan biasanya disebut penduduk berpendapatan rendah relatif. Jika proporsinya menurun, artinya semakin sedikit penduduk yang berpenghasilan kurang dari separuh median. Ini menunjukkan bahwa pendapatan kelompok terbawah meningkat lebih cepat dibanding median, atau distribusi pendapatan semakin merata. Tren penurunan proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% median pendapatan menunjukkan perbaikan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah. Penurunan tersebut mengartikan bahwa kesenjangan pendapatan menurun karena distribusi pendapatan lebih inklusif sehingga dari sisi daya beli kelompok bawah membaik, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga. Secara teoritis, penurunan indikator ini mencerminkan perbaikan kesejahteraan relatif masyarakat berpendapatan rendah, karena semakin sedikit individu yang memiliki pendapatan jauh di bawah standar kesejahteraan rata-rata (Alkez., et.al, 2024). Dengan kata lain, distribusi pendapatan menunjukkan kecenderungan yang lebih merata di lapisan terbawah. Temuan ini sejalan dengan konsep *relative poverty* yang digunakan oleh OECD dan World Bank, di mana proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah 50 persen median menjadi ukuran penting untuk menilai tingkat ketimpangan dan pemerataan ekonomi (Schneider., et.al, 2010).

Namun, dalam periode yang sama, proporsi kelas menengah justru menunjukkan tren penurunan. Fenomena ini menandakan bahwa meskipun kemiskinan relatif berkurang, tetapi terjadi penyusutan kelas menengah yang dapat mengindikasikan adanya polarisasi pendapatan yaitu sebagian besar penduduk kelas menengah berpotensi terdorong ke bawah karena tekanan inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan biaya hidup yang meningkat, sementara sebagian kecil kelompok menengah lainnya mungkin mengalami mobilitas ke atas menjadi kelompok berpendapatan tinggi (Mlachila, 2014). Dengan demikian, meskipun kelompok miskin relatif semakin kecil, penurunan proporsi kelas menengah menunjukkan bahwa proses pemerataan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Fenomena ini menggambarkan kondisi yang juga pernah dicatat oleh World Bank (2022) dalam studi mengenai dinamika kelas menengah di Indonesia, di mana kelompok berpendapatan menengah masih rentan terhadap guncangan ekonomi dan belum memiliki daya tahan yang cukup terhadap fluktuasi makroekonomi. Oleh karena itu,

penurunan proporsi penduduk miskin relatif perlu diinterpretasikan secara hati-hati, sebab tanpa perluasan dan penguatan basis kelas menengah, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa peningkatan kesejahteraan yang merata. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari penurunan kemiskinan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan stabilitas dan mobilitas sosial kelompok menengah dalam struktur ekonomi nasional.

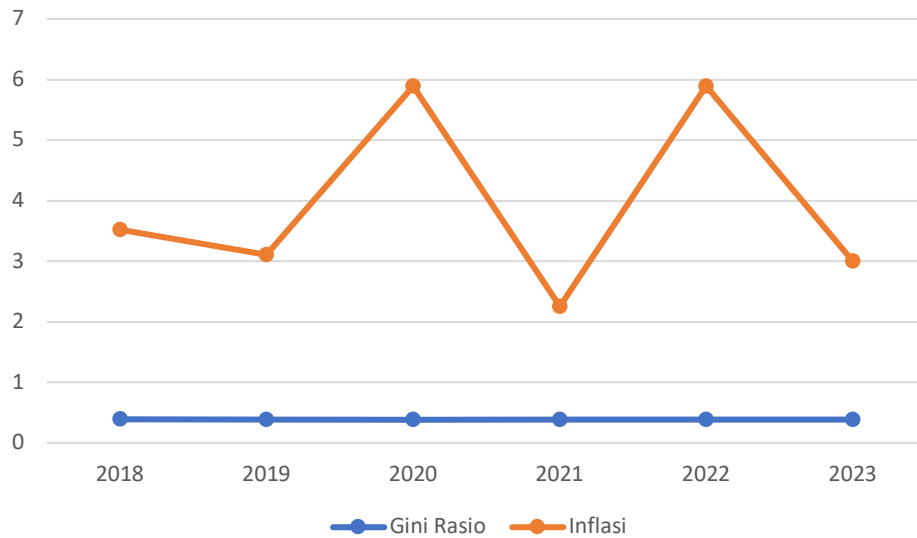


Gambar 2. Perbandingan Pengeluaran Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama periode 2018–2023, pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan yang relatif konsisten, dari sekitar 8 juta menjadi lebih dari 11 juta, sementara pengeluaran pemerintah juga meningkat, tetapi dengan skala yang jauh lebih kecil dan pertumbuhan yang lebih lambat. Kecenderungan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode tersebut sebagian besar masih didorong oleh konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB nasional. Namun demikian, peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga belum tentu mencerminkan peningkatan daya beli riil, terutama dalam konteks menyusutnya proporsi kelas menengah. World Bank (2022) mencatat bahwa kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan akibat inflasi pangan, biaya perumahan, dan stagnasi pendapatan riil pasca-pandemi. Dengan demikian, meskipun secara agregat pengeluaran rumah tangga meningkat, sebagian besar kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa (inflasi), bukan peningkatan kesejahteraan riil. Fenomena ini konsisten dengan tren penurunan proporsi kelas menengah yang dilaporkan dalam berbagai studi (OECD, 2021; World Bank, 2022). Kelas menengah yang tertekan cenderung menyesuaikan pola konsumsinya dengan menunda pembelian barang lain dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Akibatnya, meskipun total konsumsi meningkat, komposisi pengeluaran bergeser ke kebutuhan dasar, mencerminkan kerentanan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang tumbuh lambat mengindikasikan keterbatasan stimulus fiskal untuk menopang konsumsi sektor rumah tangga, terutama pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Dari perspektif makroekonomi, sebagian kelompok berpendapatan tinggi mengalami percepatan pertumbuhan konsumsi, sementara kelas menengah menghadapi tekanan pendapatan yang menyebabkan proporsinya menurun. Sementara itu inflasi dan gini rasio menunjukkan gejala yang berbeda. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 gini rasio Indonesia hanya berkisar pada angka 0,38 sementara

inflasi mengalami perubahan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2023.



Gambar 3. Perbandingan Gini Rasio dan Inflasi.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Gambar di atas memperlihatkan dinamika Gini Rasio dan tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2018 sampai dengan 2023. Secara umum, Gini Rasio digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang mana dari data di atas menunjukkan perubahan yang relatif kecil dan cenderung stabil pada kisaran 0,38 sampai dengan 0,40, sedangkan tingkat inflasi menunjukkan fluktuasi yang tajam, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020 dan 2022, masing-masing mendekati 6%. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa meskipun ketimpangan pendapatan secara statistik tidak banyak berubah, tekanan inflasi menjadi faktor utama yang memengaruhi kesejahteraan riil masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah ke bawah. Stabilitas Gini Rasio tidak selalu menandakan pemerataan pendapatan yang lebih baik. Menurut World Bank (2022), stagnasi Gini Rasio di Indonesia justru menunjukkan ketimpangan yang “mengakar”, di mana sebagian besar peningkatan pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok atas, sementara mobilitas ekonomi bagi kelompok menengah ke bawah masih terbatas. Ketika inflasi meningkat tajam, terutama akibat kenaikan harga pangan dan energi, daya beli kelompok menengah menjadi sangat rentan karena proporsi pengeluaran mereka sebagian besar terserap untuk kebutuhan konsumsi dasar.

Penurunan proporsi kelas menengah selama periode 2018-2023 dapat dijelaskan melalui tekanan inflasi yang tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan riil. OECD (2021) dalam laporannya menegaskan bahwa inflasi yang tinggi terutama pasca-pandemi, menggerus kemampuan konsumsi dan tabungan kelompok menengah, menyebabkan sebagian dari mereka “turun kelas” ke kategori berpendapatan rendah. Fenomena ini dikenal sebagai *middle-class squeeze*, di mana kelas menengah kehilangan stabilitas ekonomi akibat meningkatnya biaya hidup dan ketidakmampuan menjaga standar konsumsi. Di Indonesia, kondisi tersebut terlihat jelas pada tahun 2020 dan 2022 ketika inflasi melonjak akibat disrupsi rantai pasok global dan kenaikan harga energi, sementara pendapatan riil rumah tangga tidak meningkat signifikan. BPS (2024) mencatat bahwa sebagian besar rumah tangga kelas menengah mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, rekreasi, dan tabungan, yang mengindikasikan penurunan kapasitas ekonomi jangka panjang. Walaupun Gini Rasio tampak stabil, realitas ekonomi memperlihatkan ketimpangan dalam ketahanan ekonomi antar kelompok pendapatan dimana kelompok atas mampu menyesuaikan diri dengan inflasi, sementara kelas menengah justru

kehilangan ruang mobilitas. Dengan demikian, hubungan antara inflasi yang berfluktuasi dan Gini Rasio yang stagnan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bukan hanya persoalan distribusi pendapatan, tetapi juga kestabilan harga dan daya beli. Penurunan kelas menengah dalam periode ini merefleksikan kerentanan struktural ekonomi Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan masih rentan terhadap guncangan harga.

Hasil Analisis Korelasi

Pembahasan selanjutnya adalah berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis korelasi, didapatkan hasil sebagai berikut

Tabel 1. Hasil Analisis Korelasi

Variable	Correlation (r)	Direction of Relationship	Strength of Relationship
Household Consumption ↔ Middle Class	-0.8557	Negative	Very Strong
GDP ↔ Middle Class	-0.8603	Negative	Very Strong

Hasil analisis menunjukkan nilai korelasi sebesar -0,855672699 antara konsumsi rumah tangga dan kelas menengah, yang berarti terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara kedua variabel. Secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga cenderung diikuti oleh penurunan proporsi kelas menengah. Temuan ini menarik karena secara teori, konsumsi dan kesejahteraan kelas menengah biasanya memiliki hubungan yang positif, di mana meningkatnya pendapatan dan daya beli akan mendorong pertumbuhan kelompok kelas menengah. Namun, hasil negatif yang diperoleh dalam penelitian ini justru mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara teori klasik dan kondisi empiris yang terjadi di Indonesia selama periode pengamatan. Menurut teori konsumsi Keynesian, tingkat konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel (*disposable income*). Dalam kondisi normal, semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi masyarakat juga meningkat. Namun, pada saat terjadi tekanan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, atau ketimpangan pendapatan peningkatan konsumsi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan konsumsi bisa saja disebabkan oleh naiknya harga barang (*inflasi konsumsi*), bukan karena peningkatan daya beli. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga bisa meningkat secara nominal, tetapi kelas menengah justru mengalami penurunan kesejahteraan riil. Sementara itu, berdasarkan teori kelas menengah menurut World Bank (2019) dalam laporan *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*, kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita harian antara USD 10 hingga USD 50 (PPP). Kelas ini dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang relatif stabil, serta menjadi pendorong utama konsumsi produktif dan investasi domestik. Namun, ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan, banyak rumah tangga yang berada di batas bawah kelas menengah akan turun ke kelompok rentan (*aspiring middle*). Hal inilah yang dapat menjelaskan korelasi negatif antara konsumsi rumah tangga dan proporsi kelas menengah: kenaikan konsumsi secara agregat tidak diikuti oleh peningkatan jumlah kelas menengah, karena sebagian besar kenaikan konsumsi justru berasal dari tekanan biaya hidup, bukan peningkatan pendapatan riil. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi nasional belum menjadi indikator yang sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan kelas menengah. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan riil, produktivitas, dan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi

kelompok kelas menengah. Hanya dengan cara tersebut, konsumsi dapat kembali berfungsi sebagai indikator positif dari pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Secara konseptual, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah yang memiliki stabilitas ekonomi relatif, daya beli yang kuat, serta menjadi penggerak utama konsumsi domestik dan investasi produktif. Dalam teori pembangunan ekonomi, pertumbuhan PDB diharapkan menciptakan perluasan kelas menengah, karena peningkatan output nasional biasanya diikuti oleh peningkatan pendapatan per kapita, kesempatan kerja, dan mobilitas sosial. Dengan demikian, hubungan antara PDB dan kelas menengah secara teoretis diharapkan positif. Namun, hasil penelitian menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat (-0,860318572) antara PDB dan kelas menengah. Artinya, selama periode pengamatan, kenaikan PDB tidak sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah, bahkan diiringi oleh penurunan proporsinya. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat tidak inklusif, yaitu pertumbuhan hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok menengah tidak merasakan dampak positifnya secara langsung. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Hipotesis Kuznets (Kuznets Curve Hypothesis) yang dikemukakan oleh Simon Kuznets (1955). Teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan PDB akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, karena keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok kecil yang memiliki modal dan akses terhadap sumber daya produktif. Seiring waktu, jika kebijakan pemerataan tidak efektif, pertumbuhan ekonomi justru dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan kelas menengah. Dalam konteks ini, korelasi negatif antara PDB dan kelas menengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memasuki fase pemerataan (downward phase) dari kurva Kuznets, melainkan masih berada pada fase awal pertumbuhan yang disertai peningkatan ketimpangan.

Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan analisis World Bank (2019) dalam laporan *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*, yang menyebutkan bahwa kelas menengah Indonesia masih rapuh (vulnerable middle class), yaitu kelompok yang mudah tergeser ke bawah ketika terjadi guncangan ekonomi, inflasi, atau penurunan daya beli. Artinya, meskipun PDB meningkat secara makro, jika pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh investasi asing, ekspor komoditas mentah, atau sektor non-labor intensive, pendapatan rumah tangga kelas menengah tidak ikut naik secara proporsional. Akibatnya, ukuran dan kekuatan ekonomi kelas menengah justru menurun. Dari perspektif teori *trickle-down effect*, hasil korelasi negatif ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menetes ke bawah, terutama bila struktur ekonomi masih didominasi oleh konsentrasi kepemilikan modal dan rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor informal. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB yang tinggi tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan kelas menengah, kecuali diiringi kebijakan redistribusi yang efektif, seperti peningkatan kualitas pendidikan, reformasi pajak progresif, dan pemberdayaan sektor usaha mikro kecil menengah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi memperlemah kelas menengah, padahal kelas ini memiliki peran penting sebagai penopang stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan angka PDB, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan dan penguatan daya tahan ekonomi kelas menengah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara konsumsi rumah tangga dan kelas menengah menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat, yang berarti peningkatan konsumsi rumah

tangga tidak diikuti oleh peningkatan proporsi kelas menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan konsumsi lebih disebabkan oleh tekanan biaya hidup dan inflasi, bukan karena meningkatnya pendapatan riil. Dengan demikian, meskipun konsumsi agregat naik, kesejahteraan kelas menengah justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi nasional belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, melainkan menggambarkan adanya tekanan ekonomi yang dialami kelompok menengah.

Sementara itu, hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan kelas menengah juga menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum bersifat inklusif. Kenaikan PDB tidak disertai dengan perluasan kelas menengah, yang berarti hasil pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Temuan ini sejalan dengan Hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi di Indonesia belum berperan efektif dalam memperkuat kelas menengah. Diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemerataan pendapatan, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya beli agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan riil masyarakat menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkez Dzar, A., Foley, A., Lowans, C., & Furszyfer Del Rio, D. (2024). Energy poverty assessment: Indicators and implications for developing and developed countries. *Energy Conversion and Management*, 307, 118324. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118324>
- Asian Development Bank. (2010). *Key Indicators for Asia and the Pacific 2010: The Rise of Asia's Middle Class*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27726/key-indicators-2010>.
- Ariani, M., Setiyanto, A., & Purwantini, T. B. (2020). Dampak pembatasan sosial berskala besar terhadap distribusi dan pola konsumsi pangan rumah tangga. *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 437–454. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/layananpublik/publikasi/buku-tematik/662-dampak-pandemi-covid-19-perspektif-adaptasi-dan-resiliensi-sosial-ekonomi-pertanian>
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2008). What is middle class about the middle classes around the world? *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 3–28. <https://doi.org/10.1257/jep.22.2.3>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: BPS. <https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=0000&q=Konsumsi+Rumah+Tangga+2018+2024&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=terbaru>
- Birdsall, N. (2007). *Reflections on the macro foundations of the middle class in the developing world* (Working Paper No. qt4nt1n232). Center for Global, International and Regional Studies, UC Santa Cruz.
- Birdsall, N., Graham, C., & Pettinato, S. (2000). *Stuck in the tunnel: Is globalization muddling the middle class?* Brookings Institution, Center on Social and Economic Dynamics (Working Paper No. 14).
- Doepke, M., & Zilibotti, F. (2008). Occupational choice and the spirit of capitalism. *The Quarterly Journal of Economics*, 123(2), 747–793. <https://doi.org/10.1162/qjec.2008.123.2.747>
- Easterly, W. (2001). The middle class consensus and economic development. *Journal of Economic Growth*, 6(4), 317–335. <https://doi.org/10.1023/A:1012786330095>

- Hasmarini, M. I. (2005). Analisis konsumsi di Indonesia tahun 1989–2002 (Tinjauan terhadap Hipotesis Keynes dan Post Keynes). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 143–162. <https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/3998>
- International Monetary Fund. (2023). *Indonesia: Article IV consultation report*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Kharas, H. (2017). *The unprecedented expansion of the global middle class: An update*. Brookings Institution.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Mankiw, G. N. (2016). *Macroeconomics* (9th ed.). New York: Worth Publishers.
- Mlachila, M., Tapsoba, R., & Tapsoba, S. J. A. (2014). *A quality of growth index for developing countries: A proposal* (IMF Working Paper No. 14/172). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781498393931.001>
- Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1989). Income distribution, market size, and industrialization. *The Quarterly Journal of Economics*, 104(3), 537–564. <https://doi.org/10.2307/2937810>
- Nababan, S. S. M. (2013). *Pendapatan dan jumlah tanggungan pengaruhnya terhadap pola konsumsi PNS dosen dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*. *Jurnal EMBA*, 1(4), 2130–2141. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.3423>
- OECD. (2021). *Under pressure: The squeezed middle class*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/social/under-pressure-the-squeezed-middle-class-689afed1-en.htm>
- Our World in Data. (2023). *Relative poverty: Share of population below 50% of median income*. <https://ourworldindata.org/poverty>
- Ravallion, M. (2010). *The developing world's bulging (but vulnerable) middle class*. *World Development*, 38(4), 445–454.
- Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C. E. (2010). *Shadow economies all over the world: New estimates for 162 countries from 1999 to 2007* (Policy Research Working Paper No. 5356). The World Bank.
- Silvia, E. D., & Susanti, R. (2019). Analisis konsumsi dan tabungan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 154–164. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/43>
- World Bank. (2022). *Aspirations and middle-class dynamics in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Bank. (2019). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. Washington, D.C.: World Bank Group.